

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Alim Salam. 2008. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)*, Jakarta
- Bernhard Limbong 2015 *Poros Maritim*, PT Dharma Karsa Utama, Jakarta
- Divera Wicaksono, 2007, *Menutup Celah Pencurian Ikan*, yayasan penerbit nusantara, jakarta.
- Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
- Hani, N., 2007, "Penentuan Batas Terluar Landas Kontinen Indonesia di Kawasan Perairan Barat Daya Sumatra Berdasarkan Garis 100 Mil dari Isobath 2500 M", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006
- Johan, E., 2009, *Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia*, Universitas Sultan Tirtayasa, Banten
- Lestyani, W., 2012, "Kajian Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dan Republik Filipina (Secara Kartometrik)", skripsi, Jurusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Marhaeini Simbolo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Marpaung, Leden. 1993. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, halaman
- _____, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung.
- Musavia, E A., 2012, "Kajian Penentuan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka", skripsi, Jurusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Nurhakim, 2007. *Wilayah Pengelolaan Perikanan, Status Perikanan Menurut Wilayah Pengelolaannya*. Subhat, dkk. Pusat Riset Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- N.H.T. Siahaan dan H. Suhendi, 1989, *Hukum Laut Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Perwita, Banyu dan Yani, Moch. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung : Rosdakarya.
- Puspitawati, D., 2005, "The East/West Archipelagic Sea Lanes Passage Through the Indonesian Archipelago", *Maritime Studies*. Yogyakarta.
- Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana. 2017. *Akibat Hukum Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982*. Universitas Atma Jaya : Yogyakarta.
- Rudy, Teuku May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global :isu, konsep, teori dan paradigma*. Bandung.

Salam, A A., dkk, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan. Bandung.

Sefriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta

Sitepu, Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu , Yogyakarta

Sumaryo, dan Arsana, I M A., 2008, *Aspek Geospasial Batas Maritim Internasional Indonesia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sodik, Dikdik Mohammad. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung : PT Rafika Aditama

Supriadi & Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law Of The Sea, (Manchester: Manchester University Press, 1983)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, (Brilian Internasional, 2011), Surabaya

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi UNCLOS Tahun 1982

Undang-undang No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

C. SUMBER LAINNYA

UNCLOS adalah konvensi hukum laut PBB yang mengatur dan memberikan gambaran secara lengkap mengenai penguasaan atas laut yang meliputi: Hak navigasi, pelestarian lingkungan laut, eksploitasi sumberdaya, yurisdiksi ekonomi, dan isu maritim. Bakosurtanal, Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakses dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuanrepublik-indonesia> , diakses pada (06/4/2019, 08:05 WIB)

Ahmad Sofian, 2018, *Penindakan dan Penghukuman Illegal Fissing*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>, di akses pada tanggal 29 Juli 2019 , Pukul 2.09

http://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional diakses pada tanggal 30 Juli 2019

<http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuanrepublik-indonesia> , diakses pada (06/4/2019, 08:05 WIB)

KKP, Ulasan Singkat FAO 2014: Peluang dan Tantangan Sektor Perikanan, diakses dalam <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-peluang-dan-tantangan-sektor-perikanan> , diakses pada (05/04/2019, 20.36 WIB)

Laila, Najmu, 2012, *Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional*, Skripsi Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional, Universitas Indonesia, diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 00:15 Wib.

Ririn Ambarwati, Membangun kelautan untuk mengembalikan kejayaan sebagai Negara Maritim, diakses dalam <http://www.ppk->

kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untukmengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html, diakses pada (06/04/2019, 08:30 WIB)